



**Pemerintah Alokasikan Bantuan Tambahan TKD dan Penyaluran TDF
sebesar Rp19,14 Triliun untuk Dukungan Kapasitas Fiskal Pemerintah Daerah**

Jakarta, 11 Agustus 2026 – Pemerintah melalui Kementerian Keuangan menetapkan kebijakan bantuan dalam bentuk tambahan Transfer Keuangan Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2026 dan penyaluran TDF total sebesar Rp18,9 triliun. Kebijakan ini dituangkan dalam Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 198 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi dan Penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) TA 2026, Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil (KB DBH) s.d. TA 2024, dan Penyaluran Dana *Treasury Deposit Facility* (TDF) pada TA 2026. Dilengkapi dengan skema efisiensi dan penghematan yang dapat dilakukan, langkah ini diambil untuk memperkuat kapasitas fiskal Pemerintah Daerah dalam rangka memberikan jaminan dan dukungan penggajian aparatur sipil negara daerah, dukungan penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta terselenggaranya pelayanan publik di daerah. Bantuan penambahan tersebut telah disalurkan pada tanggal 7 Agustus 2026.

Plt. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Nufansa Wira Sakti, menekankan bahwa Kebijakan bantuan ini merupakan wujud perhatian yang sangat besar dari Presiden terhadap kondisi keuangan pemerintah daerah. Presiden sangat memahami kondisi keuangan daerah yang sedang dialami pemerintah daerah. Pemerintah Pusat juga mendengarkan aspirasi dari pemerintah daerah yang mengalami kesulitan dalam anggarannya. Atas dasar tersebut, Presiden telah memberi petunjuk untuk memberikan bantuan dari Pemerintah Pusat kepada pemerintah daerah.

Dengan bantuan tersebut, pemerintah daerah diharapkan dapat melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dengan lancar, termasuk pembayaran gaji para pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Daerah dan juga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) di pemerintah daerah.

“Keputusan ini juga menjadi langkah lanjutan setelah sebelumnya pemerintah menyalurkan tambahan TKD untuk dukungan penanganan bencana sebesar Rp10,65 triliun untuk wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat,” ujar Nufansa.

Pemerintah berharap kebijakan bantuan dalam bentuk tambahan TKD Tahun Anggaran 2026 dan penyaluran TDF ini tidak hanya menjadi solusi jangka pendek, tetapi juga diharapkan menjadi modal dasar pembangunan pemerintah daerah untuk memperkuat tata kelola keuangan yang lebih efisien dan transparan. Ke depan, pemerintah pusat akan terus melakukan kerjasama, pembinaan, bimbingan dan evaluasi secara berkala serta mengoptimalkan kebijakan fiskal yang responsif terhadap kebutuhan daerah, guna memastikan stabilitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan di seluruh Indonesia. Sinergi antara pusat dan daerah akan terus diperkuat agar setiap kebijakan transfer keuangan daerah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas.

Narahubung Media:

Ludiro
Sekretaris Direktorat Jenderal Perimbangan
Keuangan



081310004134



kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id



Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan



ditjenpk



@ditjenpk



DitjenPK
Kemenkeu RI

